

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggriani, N. (2009). *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*. Surabaya: Yayasan Humaniora.
- Asshiddique, J. (2016). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI.
- Bambang Suteng Sulasmono. (2015). *Dasar Negara Pancasila*. Sleman: Kanisius.
- Budiarta, D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pers.
- Carmona. (2008). *Public Space : The Management Dimension*. Routledge: Taylor & Francis Group.
- DW Ariyani. (2014). *Manajemen Kualitas*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi Amrusi. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- G. Setya Nugraha, R. M. f. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Gramedia.
- Gie, T. L. (2011). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- HR, R. (2010). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafie. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Irafany, S. . (2020). *Indeks Kenyamanan Jalur Pedestrian Berbasis Kebutuhan Pejalan Kaki di Kota Makassar*. Unibersitas Hasanuddin.
- Irra Chrisyanti Dewi. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi.

- Kaelan. (2003). *Pendidika Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamal Hidjaz. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- La Ode Bariun. (2015). *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Universitas Hasanuddin.
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana.
- Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: UAY.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- N Anggriani. (2010). *Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*. Surabaya: Yayasan Humaniora.
- Najih dan Soimin, M. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia* (Cetakan Pe). Malang: Setara Press.
- Nieuwenhuis, J. H. (2015). *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht), terjemahan Djasadin Saragih*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pasolong Harbani. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pfiffner dan Presthus. (2003). *Public Administration*. New York: The Ronald Press.
- Philipus M. Hadjon. (2018). *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: UNAIR Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. oxford: OUP.
- S.R, H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Samidjo. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Sarundajang. (2012). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setya Retnami. (2011). *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- SF. Marbun. (2017). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suko Wiyono. (2013). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Pers.
- Yeremias T Keban. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Negara, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rancangan Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung.

PERMENPUPR Nomor 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan.

C. Sumber Lain

Bayu Saputra, R. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jom FISIP*, 1(2), 1–15.

Black, H. C. (1991). *Black's Law Dictionary*. Boston: St Paul Minn West Publishing. Co.

D, H. (2019). Ruang Publik Kata Dua: Ruang Publik Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka. *Nalars*, 18(1), 56–130.

Elias Hence Thesia. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura. *Jurnal Crepido*, 4(1).

Ketut Cahaya Rai Siwi, I. (2021). Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar. *Jurnal Prefensi Hukum*, 2(3),

Kurniawan, F. (2019). Pola-Pola Pemanfaatan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Mangga Besar-Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, Dan Ilmu Kesehatan*, 3(1),

Mckinley, C. (2016). 2. Capital Markets. *Covering Globalization*, 17–31. <https://doi.org/10.7312/schi13174-003>

Rahayu, J. (2018). Pengembangan Trotoar Sebagai Jalur Pejalan Kaki Pada Koridor jalan Utama Pusat Kota Wonogiri (Studi Kasus : Trotoar Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, dan Jl. Pemuda). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 73–82.

Rizka Nur Febriyani. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(3), 2.

Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.